

BAB I

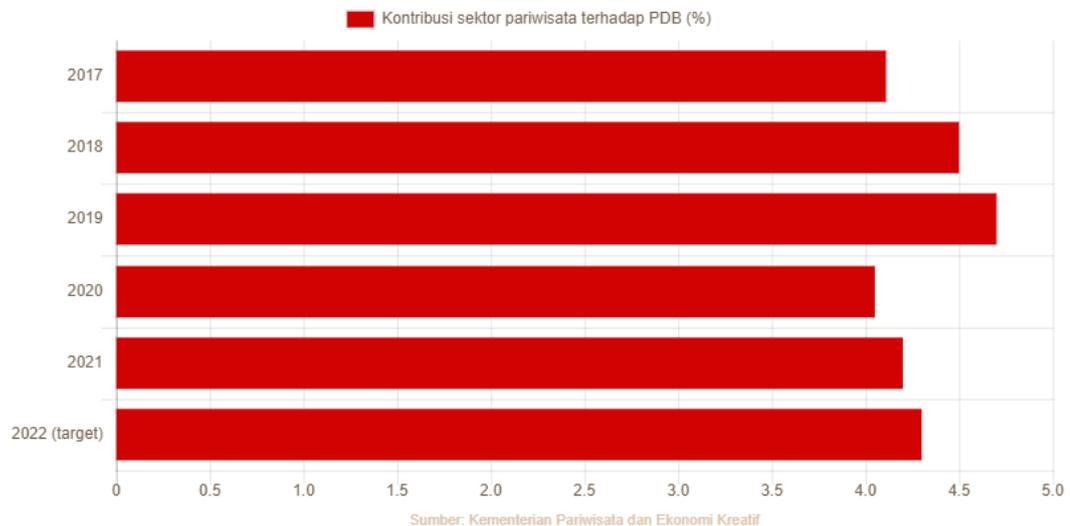
PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Pariwisata merupakan salah satu dari beberapa sektor yang menjadi prioritas Pemerintah Indonesia dalam pembangunan nasional 2017. Dalam pembangunan nasional tahun 2017, terdapat beberapa prioritas diantaranya yaitu sektor energi, pangan, maritim, kawasan industri, serta pariwisata. Sektor pariwisata menjadi suatu sektor yang berpotensi untuk mendorong perekonomian masyarakat. Hal ini disebabkan sektor pariwisata menjadi sumber penerimaan devisa negara terbesar sehingga dapat secara langsung berperan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Pariwisata telah menyumbang devisa negara sebanyak kurang lebih Rp 280 triliun pada tahun 2019. Jumlah ini cukup signifikan mengingat penerimaan dari sektor pariwisata lebih besar dibandingkan penerimaan devisa dari sektor migas.

Gambar 1. 1

Penghasilan Sektor Pariwisata dalam PDB



Sumber: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata diolah databoks.katadata, 2022

Data Gambar 1.1 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan dalam produk domestik bruto (PDB) dari sektor pariwisata pada tahun 2017 sampai dengan 2019. Pada tahun 2020 sempat terjadi penurunan jumlah PDB yang bersumber dari pariwisata, yaitu hanya sebesar 4,05%, setelah di tahun sebelumnya mencapai 4,7%. Namun, pada tahun 2021 kembali terjadi peningkatan yang mengakibatkan hingga kini pariwisata masih menjadi sektor unggulan dalam penerimaan PDB.

Pariwisata ditetapkan sebagai salah satu sektor unggulan Pembangunan Nasional pada tahun 2019, disamping pertanian dan perikanan. Presiden Indonesia, Joko Widodo, menetapkan Pariwisata sebagai *leading sector*. *Leading Sector* dapat dimaknai sebagai sektor pemimpin atau unggulan dalam sebuah pelaksanaan pembangunan. Pariwisata dianggap sebagai sektor yang potensial sehingga potensi Pariwisata Nasional harus dapat dimanfaatkan dengan baik.

Dalam rangka mewujudkan Pariwisata sebagai *leading sector* ekonomi bangsa, beberapa langkah atau upaya terus dilakukan oleh Pemerintah dan *stakeholders* pariwisata lainnya. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah (Kementerian Pariwisata) yaitu melalui promosi dengan *branding* Pesona Indonesia dan *Wonderful Indonesia*. *Branding* tersebut dibangun melalui promosi dengan kerjasama beberapa artis atau tokoh nasional melalui media sosial. Dengan demikian, media sosial dianggap menjadi media yang paling efektif untuk promosi pariwisata.

Pariwisata Indonesia merupakan sektor yang menjadi pusat perhatian pemerintah agar terus dikembangkan. Pemerintah telah bertekad untuk memajukan pariwisata nasional agar dapat menarik wisatawan dari lokal maupun asing. Data sepanjang tahun 2019 menunjukkan bahwa total wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke Indonesia sebanyak 16,11 juta kunjungan. Angka ini naik 1,88% dibandingkan dengan angka total kunjungan wisatawan mancanegara pada periode 2018 yang berada diangka 15,81 juta kunjungan.

Dalam rangka untuk meningkatkan pariwisata dan menarik wisatawan lokal maupun mancanegara, Pemerintah sangat serius melalui berbagai programnya dalam rangka peningkatan pariwisata, salah satunya adalah diferensiasi pariwisata. Pada contoh paket tour VIWI (*Visit Indonesia, Wonderful Indonesia*) 2019 dilakukan dengan mengelompokkan 18 destinasi unggulan. Destinasi unggulan tersebut tersebar di beberapa daerah diantaranya yaitu; Sumatera (Medan/Danau Toba, Batam, Belitung, Padang, dan Palembang);

Pulau Jawa (Jakarta, Bandung, Borobudur/Yogyakarta,Solo, Subaya-Bromo-Tengger, dan Banyuwangi); Kalimantan (Balikpapan); Bali, Nusa Tenggara Barat (Lombok); Sulawesi (Makassar/Wakatobi dan Manado); dan Papua Barat (Raja Ampat).

Selain dari adanya *branding* dan pembuatan paket wisata, Pemerintah juga melakukan pengembangan destinasi wisata serta pembangunan objek wisata baru, seperti salah satunya adalah pembangunan Desa Wisata. Desa Wisata dapat diartikan sebagai sebuah kawasan pedesaan yang di dalamnya menawarkan suasana asli desa dari sosial ekonominya, sosial budaya, kehidupan kesehariannya, adat istiadat setempat, tata letak desa yang memiliki ciri khas, ataupun kegiatan ekonomi masyarakat yang memiliki potensi untuk dikembangkan. (Andayani, Martono, & Muhamad, 2017)

Damanik (2013) menjelaskan mengenai berbagai potensi desa yang dapat dikembangkan antara lain adalah potensi sumber daya alam yang dapat memuat komponen pariwisata seperti atraksi, akomodasi, dan kebutuhan wisata lainnya. Pariwisata desa dapat dikembangkan dengan didorong oleh tiga faktor diantaranya, yaitu:

- 1) Kawasan pedesaan yang mempunyai potensi alam dan kebudayaan lebih otentik daripada kawasan perkotaan disebabkan masyarakat desa masih memiliki tradisi dan ritual-ritual kebudayaan serta topografi yang masih serasi.

- 2) Kawasan pedesaan yang mempunyai lingkungan yang masih asri dan masih tidak tercemar oleh berbagai macam polusi jika dibandingkan dengan kawasan perkotaan.
- 3) Kawasan pedesaan masih memiliki perkembangan ekonomi yang relatif lambat, sehingga yang menjadi alasan untuk pengembangan pariwisata pedesaan adalah untuk memanfaatkan potensi ekonomi serta sosial budaya masyarakat setempat. (Andayani et al., 2017)

Pada tahun 2020, pengembangan Desa Wisata telah menjadi fokus utama dalam pemanfaatan Dana Desa. Berdasarkan data dari Potensi Desa (Podes) 2018 terdapat 1.734 Desa Wisata yang terpencair di seluruh wilayah Indonesia. Sebanyak 857 desa berada di Pulau Jawa-Bali, dimana angka ini merupakan yang tertinggi dalam jumlah keseluruhan Desa Wisata. Di Jawa Tengah sendiri, jumlah Desa Wisata tahun 2019 sebanyak 290 desa yang tersebar di beberapa Kabupaten/Kota. Jumlah Desa Wisata terbanyak di Jawa Tengah terletak di Kabupaten Magelang yaitu sekitar 50 desa wisata (2019).

Tabel 1. 1

Data Persebaran Desa Wisata di Jawa Tengah

No	Nama Kabupaten/ Kota	Jumlah Desa Wisata
1	Banjarnegara	20
2	Banyumas	2
3	Batang	6
4	Blora	1
5	Boyolali	7
6	Brebes	6
7	Cilacap	7
8	Demak	3
9	Grobogan	5
10	Jepara	9
11	Karanganyar	16
12	Kebumen	12
13	Kendal	8
14	Klaten	24
15	Kudus	14
16	Magelang Kabupaten	50
17	Magelang	1
18	Pati	6
19	Pekalongan Kabupaten	1
20	Pekalongan Kota	3
21	Pemalang	4
22	Purworejo	16
23	Purbalingga	4
24	Rembang	4
25	Salatiga	1
26	Kabupaten Semarang	20
27	Kota Semarang	8
28	Sragen	3
29	Sukoharjo	3
30	Surakarta	2
31	Tegal Kabupaten	5
32	Tegal Kota	1
33	Temanggung	5
34	Wonogiri	2
35	Wonosobo	12

Sumber: Diolah peneliti dari data Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Jawa Tengah, 2019

Berdasarkan data persebaran Desa Wisata di Jawa Tengah, jumlah desa wisata yang terletak di Kabupaten Tegal yakni sebanyak lima desa wisata. Kabupaten Tegal menjadi salah satu wilayah Kabupaten yang berada di

bagian barat laut Provinsi Jawa Tengah dengan luasnya sekitar 876,10 km². Potensi sumber daya alam yang cukup indah berada di Selatan Kabupaten Tegal, sehingga di wilayah ini terdapat beberapa objek wisata yang telah didirikan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan *stakeholders* lainnya. Kabupaten Tegal telah berusaha mengembangkan pariwisatanya dengan menerbitkan Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan. Pemerintah Kabupaten Tegal mulai serius dalam mengembangkan pariwisatanya, salah satunya berfokus dalam pengembangan Desa Wisata.

Tabel 1. 2
Desa Wisata Kabupaten Tegal

No	Nama Desa Wisata	Alamat	Keterangan
1	Desa Wisata Cempaka	Desa Cempaka Kec. Bumijawa Kab. Tegal	Wisata Alam, Wisata budaya dan Wisata Kuliner
2	Desa Wisata Muncanglarang	Desa Muncanglarang Kec. Bumijawa Kab. Tegal	Wisata Alam, Wisata budaya dan Wisata Kuliner
3	Desa Wisata Religi Cikura	Desa Cikura Kec. Bojong Kab. Tegal	Wisata Religi
4	Desa Wisata Religi Giren	Desa Kaligayam Kec. Talang Kab. Tegal	Wisata religi
5	Desa Wisata Sigedong	Desa Sigedong Kec. bumijawa Kab. Tegal	Wisata Alam, Wisata budaya dan Wisata Kuliner
6	Desa Wisata Luwijawa	Desa Luwijawa Kec. Jatinegara Kab. Tegal	Wisata Alam dan Wisata Kuliner
7	Desa Wisata Munjung Agung	Desa Munjung Agung Kec. Kramat Kab. Tegal	Wisata Bahari, Wisata Kuliner
8	Desa Wisata Pagerwangi	Desa Pagerwangi Kec. Balapulang Kab. Tegal	Wisata Alam
9	Desa Wisata Batik Benge	Desa Benge Kec. Talang Kab. Tegal	Wisata Budaya
10	Desa Wisata Batik Pasangan	Desa Pasangan Kec. Talang Kab. Tegal	Wisata Budaya
11	Desa Wisata Batik	Desa Pangkah	Wisata Budaya

No	Nama Desa Wisata	Alamat	Keterangan
	Pangkah	Kec.Pangkah Kab. Tegal	
12	Desa Wisata Batik Dukuhsalam	Desa Dukuhsalam Kec. Slawi Kab. Tegal	Wisata Budaya
13	Desa Wisata Batik Sindang	Desa Sindang Kec. Dukuhwaru Kab. Tegal	Wisata Budaya

Sumber: Diolah peneliti dari data Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Jawa Tengah, 2019

Berdasarkan Tabel 1.4 salah satu desa wisata yang telah berpotensi dan menjadi pusat perhatian wisatawan adalah Desa Wisata Cempaka. Desa Cempaka merupakan salah satu desa yang secara administratif berada di Kecamatan Bumijawa. Desa Wisata Cempaka merupakan desa pertama di Kabupaten Tegal yang memperoleh Surat Keputusan sebagai desa wisata dengan SK Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal nomot 556/18/0988/2017 mengenai Penetapan Desa Cempaka Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal sebagai Desa Wisata. Desa Wisata Cempaka ini memiliki gabungan antara uniknya sumber daya alam dan kegiatan ekonomi kreatif sebagai daya tarik wisata utamanya. Adapun daya tarik alam berupa telaga Tuk Mudal di Desa Wisata Cempaka yang dapat digunakan untuk kegiatan memancing dan berenang dengan pemandangan alam yang cukup indah. Selain itu, terdapat Bukit Brongkol dan Bukit Bulak yang menyuguhkan pemandangan negeri diatas awan sehingga dapat digunakan sebagai objek wisata untuk berkemah.

Atraksi wisata yang memanfaatkan potensi desa dan ekonomi kreatif di Desa Cempaka adalah Pasar Slumpring. Pasar Slumpring merupakan pasar yang menyuguhkan suasana tempo dulu dimana dalam pasar ini hanya diperuntukkan untuk menjual makanan tradisional. Pasar ini hanya beroperasi setiap hari Minggu

saja, hal ini dikarenakan semua pedagang yang ada di Pasar Slumpring merupakan warga asli Desa Cempaka yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani dan pedagang. Berdasarkan keunikannya tersebut, Pasar Slumpring telah menjadi destinasi wisata unggulan di Desa Wisata Cempaka maupun di Kabupaten Tegal.

Beberapa keunggulan atau potensi Desa Wisata Cempaka menyebabkan jumlah pengunjung Desa Wisata Cempaka setiap tahunnya mengalami peningkatan. Data jumlah pengunjung Desa Wisata Cempaka tahun 2018 dan 2019 sebagai berikut:

Tabel 1. 3

Data Jumlah Wisatawan Desa Wisata Cempaka Tahun 2018-2019

No	Bulan	Tahun		Pertambahan
		2018	2019	
1	Januari	0	24.067	24.067
2	Februari	18.567	18.948	381
3	Maret	13.954	18.230	4.276
4	April	14.300	14.393	93
5	Mei	7.906	0	-7.906
6	Juni	17.654	35.254	17.600
7	Juli	11.876	13.300	1.424
8	Agustus	16.987	17.613	626
9	September	14.563	18.873	4.310
10	Oktober	15.900	16.180	280
11	November	16.870	16.928	58
12	Desember	22.879	26.189	3.310

Sumber: Diolah peneliti berdasarkan data hasil observasi lapangan oleh Galih dan Saraswati, 2020

Berdasarkan data jumlah wisatawan pada Tabel 1.3 dapat diketahui bahwa jumlah pengunjung pada 2018 dan 2019 mengalami peningkatan hingga mencapai

rata-rata kurang lebih 4.702 setiap bulannya. Peningkatan jumlah pengunjung Desa Wisata Cempaka ini memberi sinyal bahwa potensi ekowisata yang ada mampu dikembangkan menjadi lebih baik dan tertata.

Desa Wisata Cempaka dikelola swadaya oleh Kelompok Sadar Wisata (pokdarwis) setempat yang secara hierarki berada dalam BUMDesa. Hingga saat ini, pengelola masih dipegang secara mandiri oleh Pokdarwis. Oleh karena jumlah pengunjung yang semakin meningkat tiap tahunnya, maka diperlukan sebuah pengembangan guna menunjang peningkatan dalam memberikan pelayanan kepada wisatawan. Pengembangan pariwisata ini tentunya membutuhkan peran serta *stakeholders* lain, mengingat dalam proses pengembangan ini menyangkut banyak aspek dan tidak dapat dilakukan oleh satu atau dua pihak saja. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang menyangkut pengembangan pariwisata, *stakeholders* sangat dibutuhkan untuk ikut berpartisipasi dalam rangkaian proses pengembangan pariwisata. Seperti dalam penelitian Tri Yuniningsih, Titi Darmi, dan Susi Sulandari tahun 2019 yang menghasilkan bahwa dalam pengembangan pariwisata di Kota Semarang telah melibatkan beberapa *stakeholders* yang digolongkan menggunakan model pentahelix, yakni dengan pelibatan aktor dari akademisi, pemerintah, komunitas, bisnis, dan media. Model pentahelix ini dinilai sesuai jika diterapkan dalam pengembangan pariwisata yang menghubungkan *stakeholders* dari akademisi, pemerintah, komunitas, bisnis, dan media.

Pariwisata mengandung konsep yang komprehensif dimana harus terjadi kesinambungan dalam rangka penyelenggaraan objek wisata. Objek pariwisata memerlukan sebuah pengembangan dengan kurun waktu minimal setiap tahun

sekali. Seperti apa yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah yang di dalamnya mengatur mengenai pengembangan Desa Wisata yang meliputi beberapa aspek, yakni; 1) Pengembangan Infrastruktur Desa Wisata; 2) Pemasaran Desa Wisata; 3) Penguatan Kelembagaan Desa Wisata; 4) Kerjasama Aktor.

Gambar 1. 2

Lahan Parkir Pasar Slumpring



Sumber: Dokumentasi Peneliti di kawasan parkir Pasar Slumpring, 2021

Aspek pertama dalam pengembangan Desa Wisata adalah Pengembangan Infrastruktur Desa Wisata. Gambar 1.3 menunjukkan bahwa adanya fenomena keterbatasan lahan parkir yang ada di Pasar Slumpring Desa Wisata Cempaka, sehingga dibutuhkan adanya pengembangan dalam hal infrastruktur yakni salah satunya berupa lahan parkir. Dalam rangka mewujudkan pengembangan infrastruktur di Desa Wisata Cempaka, dibutuhkan kerjasama dari beberapa *stakeholders*. Peran *stakeholders* dalam pengembangan Desa Wisata Cempaka ini dapat dikaji dengan menggunakan perspektif pentahelix yang menggolongkan

stakeholders ke dalam lima unsur, yakni akademisi, pemerintah, bisnis, komunitas, dan media massa.

Apek kedua dalam pengembangan Desa Wisata yakni Pemasaran Desa Wisata yang membutuhkan peran serta semua pihak, terkhusus media dan komunitas dalam mempromosikan berbagai objek wisata yang ada di Desa Wisata Cempaka. Diketahui bahwa beberapa media nasional maupun lokal telah menayangkan maupun mengulas mengenai Desa Wisata Cempaka, diantaranya adalah program Fokus Indosiar, Lintas iNews Pagi di MNC TV, Jejak Petualang Trans 7, Lentera Indonesia NET TV, TVRI, Tribunnews, Suara Merdeka, dan lain sebagainya. Sedangkan media cetak lokal maupun nasional yang telah mengulas mengenai Desa Wisata Cempaka diantaranya adalah tribunnews.jateng, posjateng.id, kumparan.com, infotegal.com, viva.com, dan lain sebagainya. Namun disisi lain, promosi wisata di Desa Wisata Cempaka selama pandemi menjadi terhambat. Pengelolaan media sosial milik desa menjadi tidak berfungsi sehingga perlu adanya pengoptimalan kembali peran seluruh *stakeholders* dalam mempromosikan wisata di Desa Wisata Cempaka.

Penguatan kelembagaan Desa Wisata merupakan aspek ketiga dalam pengembangan Desa Wisata Cempaka. Pada aspek ketiga ini dapat diketahui bahwa Desa Wisata Cempaka memerlukan adanya perbaikan dalam hal pengelolaan operasionalnya yang secara mandiri dikelola oleh Pokdarwis Cempaka. Tidak adanya pendataan jumlah wisatawan oleh Pokdarwis Cempaka mengisyaratkan bahwa perlu adanya penguatan kelembagaan pengelola. Penguatan kelembagaan dapat dilaksanakan melalui bimbingan dan pelatihan

yang dibantu oleh *stakeholders* lain seperti akademisi dan pemerintah. Pada kenyataannya, hingga sekarang hanya dari unsur akademisi saja yang memberi pelatihan dalam hal manajemen pengelolaannya. Perlu adanya peran serta dari *stakeholders* lain guna upaya dalam menguatkan kelembagaan pengelola Desa Wisata Cempaka.

Aspek ke empat dalam pengembangan desa wisata adalah kerjasama aktor. Kerjasama aktor dapat dilaksanakan oleh Pokdarwis Cempaka dengan pihak lain (Akademisi, Bisnis, Pemerintah, dan Media) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar yang didasarkan atas hak dan kewajiban tiap *stakeholders*. Berdasarkan wawancara dengan Ketua Pokdarwis Cempaka, dapat diketahui bahwa beberapa kerjasama telah berjalan namun belum pada tahap maksimal. Kerjasama aktor yang telah dilaksanakan diantaranya adalah kerjasama antara Pokdarwis Cempaka dengan Bank Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam bentuk pendanaan untuk membangun gerbang desa, loket penukaran uang, loket parkir, dan papan nama wisata. Adapun diketahui bahwa kerjasama pemerintah sebagai pengatur juga belum maksimal dalam menjalankan tanggung jawabnya. Seperti Dinas Pariwisata dan Dinas Perindustrian Tenaga Kerja Kabupaten Tegal yang hanya berperan sebatas aktor pemberi pelatihan SDM, yang belum memberi tindak lanjut yang ditunjukkan untuk pembinaan UMKM Desa.

Kurangnya koordinasi dan kolaborasi antar *stakeholders* dalam pengembangan Desa Wisata Cempaka jelas menjadi salah satu penghambat dalam pelaksanaan pengembangannya, sehingga dibutuhkan adanya analisis peran

stakeholders dalam pengembangan Desa Wisata Cempaka agar dapat memberi gambaran mengenai peran yang telah dilaksanakan tiap *stakeholders* dan mengapa peran tersebut tidak berjalan dengan semestinya. Selain itu, dalam proses pengembangan pariwisata akan selalu dihadapkan pada rangkaian hambatan yang terjadi di lapangan. Beberapa hambatan tersebut yang mungkin ditemukan diantaranya adalah keterbatasan anggaran, keterbatasan sumber daya manusia, regulasi yang kurang jelas mengatur, dan lain sebagainya. Keterbatasan dana menjadi salah satu hambatan dalam hal pengembangan Desa Wusata Cempaka, sehingga beberapa pembangunan fasilitas infrastruktur yang selama ini telah dilakukan oleh Pokdarwis Cempaka dilaksanakan secara bertahap. Dana yang digunakan untuk menunjang pembangunan ini pada awalnya hanya berasal dari dana desa, dana hasil wisata Cempaka, dan dana dukungan dari BI dan BRI. Namun, diketahui bahwa Dana Desa Cempaka pada 2020 tidak lagi dianggarkan bagi pengembangan Desa Wisata Cempaka. Hal tersebut yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan dan pengembangan desa.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi dalam pengembangan Desa Wisata Cempaka, peneliti tertarik dalam menganalisa bagaimana peran *stakeholders* yang tergabung dalam perspektif pentahelix. Analisa *stakeholders* menjadi bagian penting karena dalam pengembangan Desa Wisata Cempaka membutuhkan aktor kunci yang saling berkoordinasi dan berkolaborasi membentuk suatu komitmen bersama dalam pengembangan Desa Wisata Cempaka. Selain itu, faktor penghambat juga menjadi kajian yang menarik dalam mengungkap apa saja yang

menyebabkan terhambatnya peran serta *stakeholders* dalam pengembangan Desa Wisata Cempaka.

1.2.Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, maka peneliti menetapkan rumusan permasalahannya sebagai berikut:

- 1) Bagaimana peran tiap *stakeholders* pentahelix yang terlibat dalam upaya pengembangan Desa Wisata Cempaka?
- 2) Apa saja faktor yang menghambat upaya *stakeholders* dalam pengembangan Desa Wisata Cempaka?

1.3.Tujuan Penelitian

- 1) Dalam rangka menganalisis peran tiap *stakeholders* pentahelix yang terlibat dalam upaya pengembangan Desa Wisata Cempaka.
- 2) Dalam rangka menjabarkan faktor-faktor yang dapat menghambat upaya *stakeholders* dalam pengembangan Desa Wisata Cempaka.

1.4.Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber bacaan baru dalam menambah wawasan serta ilmu pengetahuan bagi pembaca, khususnya mahasiswa Administrasi Publik mengenai peran aktor atau *stakeholders* yang terbentuk dengan menggunakan perspektif Pentahelix dalam pengembangan sebuah Desa Wisata.

1.4.2. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian ini bagi masyarakat adalah menumbuhkan kesadaran atas perlunya peran serta berbagai pihak guna keikutsertaannya dalam pengembangan sebuah Desa Wisata. Selain itu, manfaat penelitian bagi Pemerintah dan pemangku kepentingan terkait adalah untuk memberi masukan agar pemerintah daerah, dinas, dan *stakeholders* terkait lebih berperan aktif dalam pengembangan Desa Wisata.

1.5.Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1. Penelitian Terdahulu (*State of The Art*)

Tabel 1. 4
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti, Judul, Tahun	Tujuan dan Metode Penelitian	Hasil	Kelebihan	Kekurangan
1	Dibyو Prastiyo “Analaisis Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal” <i>Journal of Politic and Government Studies</i> , 8(03), 101-110.	Tujuannya untuk mengidentifikasi strategi pemberdayaan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Cempaka dalam mengembangkan potensi wilayahnya menjadi sebuah desa wisata. Metode penelitiannya kualitatif.	Pemerintah Desa Cempaka melakukan pemberdayaan yang bermanfaat bagi masyarakatnya. Terdapat delapan strategi yang dilakukan oleh Desa Cempaka.	Hasil penelitian cenderung kompleks karena tidak hanya membahas bagaimana pemberdayaannya, namun juga membahas mengenai peran aktor dan hambatan pengembangannya walaupun secara singkat.	Peneliti tidak memberikan saran atau rekomendasi atas hambatan yang ada.
2	Rhiki Pratama dan Mohammad Iqbal (2018). “Analisis	Mengetahui pola/peta jejaring <i>stakeholders</i> pariwisata di	Peta jejaring <i>stakeholders</i> pariwisata di Kota	Teori yang ada dalam Kajian Pustaka dijelaskan	Terdapat beberapa istilah yang

No	Peneliti, Judul, Tahun	Tujuan dan Metode Penelitian	Hasil	Kelebihan	Kekurangan
	<p>Pemetaan Jejaring <i>Stakeholders</i> Pariwisata di Kota Batu Dengan Menggunakan Metode Social Network Analysis (SNA)”</p> <p><i>Jurnal Administrasi Bisnis, 54(1), 179-188.</i></p>	<p>Kota Batu dengan menggunakan model SNA (<i>Social Network Analysis</i>). Metode penelitian <i>Exploratory research</i> dengan pendekatan kualitatif.</p>	<p>Batu terdiri dari <i>public sector</i> (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan), <i>private sector</i> (<i>Travel Agent</i>), dan <i>community</i> (ASITA, Pokdarwis). Berdasarkan hubungan beberapa <i>stakeholders</i> tersebut ditemukan empat jenis hubungan, antara lain:</p> <p><i>Transactions material resources; Non-material transactions; Interactions: Formal roles.</i></p>	<p>secara rinci dan terdiri atas beberapa teori yang berkaitan dengan <i>stakeholders</i>. <i>Stakeholders</i> yang dijelaskan sangat kompleks meliputi <i>public sector, private sector, dan community.</i></p>	<p>tidak dijelaskan lebih lanjut, seperti jenis hubungan, antara lain 2) <i>individual evaluations, 2) material transactions, 3) non-material transactions, 4) interactions, 5) movement, 6) formal roles, dan 7) kinship.</i></p>
3	<p>Bagus Trianggono, Pamerdi Giri Wiloso,</p>	<p>Tujuannya adalah menggambarkan peran aktor dalam pengembangan</p>	<p>Terjadi banyak sekali dinamika didalam proses</p>	<p>Terdapat pola jejaring <i>stakeholders</i> yang menggambarkan</p>	<p>Tidak dijelaskan secara rinci mengenai</p>

No	Peneliti, Judul, Tahun	Tujuan dan Metode Penelitian	Hasil	Kelebihan	Kekurangan
	Gatot Sasongko (2018). "Pariwisata Dalam Perspektif Actor Network Theory (Studi Kasus Top Selfie Pinusan Kragilan Desa Pogalan, Jawa Tengah, Indonesia)" <i>Jurnal Pariwisata Pesona</i> , 3(2), 91-104.	pariwisata Top Selfie Pinusan Kragilan (TSPK). Metode penelitiannya adalah penelitian kualitatif.	perintisan hingga pengembangan. Dinamika tersebut ter jadi pada elemen yang terlibat di dalam jaringan maupun dinamika pengendali dalam jaringan. Kemudian proses translasi dan intermediary pun mengalami dinamika, dalam perintisan proses tersebut berjalan sempurna, namun pada masa pengembangan tidak dapat berjalan sempurna karena adanya konflik.	interaksi antar aktor.	konsep teori yang digunakan yaitu <i>Actor Network Theory</i> menurut Bruno Latour.
4	Tri Yuniningsih, Titi Darmi, Susi Sulandari (2019) "Model Pentahelik	Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan model pentahelix	Pengembangan pariwisata di Kota Semarang telah menerapkan model	Peneliti menjelaskan secara rinci peran setiap aktor dalam	Penelitian menggunakan lokus general yang tidak

No	Peneliti, Judul, Tahun	Tujuan dan Metode Penelitian	Hasil	Kelebihan	Kekurangan
	Dalam Pengembangan an Pariwisata Di Kota Semarang” Journal of Public Sector Innovation, Vol. 3, No. 2 (84-93)	dalam pengembangan pariwisata di kota Semarang. Metode penelitiannya kualitatif.	pentahelix dengan pelibatan aktor dari akademisi, pemerintah, komunitas, bisnis, dan media massa. Namun, kerjasama antar aktor belum optimal.	komponen Pentahelix yaitu pemerintah, akademisi, komunitas, bisnis, dan media.	spesifik pada salah satu objek wisata.
5	Gangsar Hanajayani dan S Sariffuddin (2018) “Mengatur Desa Wisata: Peran Tokoh Masyarakat Membangun Inisiatif Kolektif Dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Komunitas” <i>TATALOKA</i> , 20(2), 195-204.	Tujuannya adalah menyajikan informasi mengenai peran tokoh masyarakat dalam mengelola desa wisata, belajar dan membangun inisiatif kolektif pengelolaan desa wisata. Metode penelitiannya adalah penelitian kualitatif.	Pengelolaan dilakuk an pokdarwis dibawah naungan Badan Pengelola Dewi Ka no sebagai koordinator d an menjalin kemitraan. Sementara selanjutn ya Pemerintah berlaku sebagai pembina dan penasihat Dewi Kano.	Peran setiap aktor dideskripsikan secara jelas dan menggunakan matriks analisa <i>stakeholders</i> .	Peneliti tidak memberi saran atau rekomendasi.
6	Ika Rizkyah Khomzi, Setiyo Yuli	Tujuannya adalah mendeskripsikan	Sinergisitas <i>stakehol ders</i>	Peneliti menganalisis	Model analisis yang

No	Peneliti, Judul, Tahun	Tujuan dan Metode Penelitian	Hasil	Kelebihan	Kekurangan
	Handono, Anis Trianawati (2019) "Sinergisitas <i>Stakeholders</i> Dalam Pengembangan Desa Wisata Pujon Kidul Kabupaten Malang" <i>Agribusiness Journal</i> , 13(2), 25-35	sinergisitas <i>stakeholders</i> dalam pengembangan Desa Wisata Pujon Kidul dan dampak yang ditimbulkan dari adanya sinergisitas <i>stakeholders</i> . Model analisis menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman.	dalam pengembangan Desa Wisata Pujon Kidul berada pada level respectful. Faktor pendukung dalam sinergisitas ini yaitu keterbukaan, saling menguntungkan, komunikasi yang baik, dan tidak adanya kepentingan pribadi. Faktor penghambatnya yaitu persepsi masyarakat yang masih belum sama, komunikasi dengan BNI masih kurang, pengetahuan regulasi pemerintah yang kurang. Dampak yang dirasakan masyarakat dari adanya sinergisitas ini yaitu penyerapan tenaga	sinergitas <i>stakeholders</i> dengan menggunakan model analisis yang berbeda dari penelitian lain, yaitu model interaktif dari Miles dan Huberman.	digunakan tidak menjelaskan peran tiap aktor dan terbatas hanya pada hubungan yang terjadi atau sinergitas antar aktor.

No	Peneliti, Judul, Tahun	Tujuan dan Metode Penelitian	Hasil	Kelebihan	Kekurangan
			kerja, peningkatan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dll.		
7	Lena Haryanti dan Saptono Nugroho (2018) "Sinergi <i>Stakeholders</i> Dalam Mewujudkan Aktivitas Pariwisata Di Desa Wisata Baha, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung" <i>Jurnal Destinasi Pariwisata p-ISSN: 2338, 8811</i> .	Mengetahui keberadaan <i>stakeholders</i> pariwisata di Desa Wisata Baha, serta mengetahui sinergi antar <i>stakeholdersnya</i> . Metode penelitian kualitatif dengan jenis data kualitatif dan kuantitatif.	<i>Stakeholders</i> pariwisata di desa wisata Baha terdiri dari: (1) Pemerintah (Dinas Pariwisata Kabupaten Badung dan Dinas Desa Baha). (2) Penyelenggara usaha pariwisata berasal dari masyarakat sekitar yang menjadikan rumahnya sebagai <i>homestay</i> , dan (3) peran masyarakat dalam objek wisata yang dikoordinir oleh POKDARWIS. Berdasarkan sinergi antar <i>stakeholders</i> yang terlibat, dapat	Peran <i>stakeholders</i> dijelaskan dengan pembagian peran antara fasilitator dan regulator, pendukung atau pemilik modal, dan masyarakat sekitar.	Penjelasan mengenai sinergitas <i>stakeholders</i> tidak menggunakan konsep atau teori yang jelas.

No	Peneliti, Judul, Tahun	Tujuan dan Metode Penelitian	Hasil	Kelebihan	Kekurangan
			dikatakan bahwa Sinergi antar pelaku pariwisata di Desa Wisata Baha masih belum maksimal.		
8	Yuliana Isnaningtyas dan Neny Marlina (2017) “Analisis Kemitraan Dalam Pengelolaan Desa Wisata Kandri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang” <i>Journal of Politic and Government Studies</i> , 6(03), 551-560.	Tujuannya adalah menganalisis kemitraan dalam pengelolaan Desa Wisata Kandri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. Metode penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif.	Pihak yang bertanggungjawab dalam mengelola Desa Wisata Kandri adalah Pokdarwis Pandanaran dan Pokdarwis. Jenis kemitraan yang ada di Desa Wisata Kandri merupakan jenis kemitraan semu (<i>psudeo partnership</i>)	Pembahasan cenderung kompleks tidak hanya menganalisis kemitraannya saja namun juga pada kendala, dampak, serta evaluasi adanya kemitraan tersebut.	Tidak dijelaskan mengenai teori apa saja yang digunakan dalam penelitian. Selain itu juga tidak disampaikan mengenai saran dan rekomendasi penulis terhadap permasalahan dan kendala yang ada dalam hasil penelitian.

No	Peneliti, Judul, Tahun	Tujuan dan Metode Penelitian	Hasil	Kelebihan	Kekurangan
9	Shafira Fatma Chaerunnisa (2020) "Analisis Komponen Pengembangan Pariwisata Desa Wisata Wonolopo Kota Semarang" <i>Journal of Public Policy and Management Review</i> , 9(4), 159-175.	Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bagaimana pengembangan pariwisata berkelanjutan di Desa Wisata Wonolopo menggunakan enam komponen pengembangan pariwisata yaitu Attraction, Accessibilities, Amenities, Acomodation, Activity, dan Ancillary service serta untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Wonolopo. Metode penelitian menggunakan	Pengembangan pariwisata di Desa Wisata Wonolopo belum optimal, masih ada yang perlu di perbaiki dari masing-masing komponen 6A. Faktor penghambatnya dijelaskan dengan adanya kesadaran dan kemauan masyarakat setempat yang tidak optimal. Selain itu juga karena kurangnya bentuk kerjasama dengan pemerintah maupun investor.	Penelitian ini memfokuskan pada apa saja yang menjadi bagian dalam pengembangan Desa Wisata Wonolopo dengan menggunakan komponen 6A.	Kesimpulan dari artikel tidak menjelaskan poin-poin dari keseluruhan hasil penelitian.

No	Peneliti, Judul, Tahun	Tujuan dan Metode Penelitian	Hasil	Kelebihan	Kekurangan
		pendekatan deskriptif kualitatif.			
10	Jae-Hyuck Lee and Yong Hoon Son (2016) “ <i>Stakeholders Subjectives Toward Ecotourism Development using Q methodology: The Case of Maha Ecotourism Site in Pyeongchang, Korea</i> ” <i>Asia Pacific Journal of Tourism Research</i> , 21(8), 931-951.	Studi ini menyelidiki konflik dan subjek pemangku kepentingan dalam kasus situs ekowisata Maha di Pyeongchang-gun. Metode penelitian menggunakan Q Methodology	Hasil menunjukkan kesenjangan generasi yang besar yaitu pejabat publik dan warga setempat. Studi ini menemukan perbedaan persepsi diantara pemuda, orang paruh baya, serta orang tua yang ada di ekowisata Maha. Sehingga ditemukan masalah yang terjadi dalam pengelolaan ekowisata Maha serta pariwisata berkelanjutan.	Penelitian dengan menggunakan Q Methodology menggunakan analisis penelitian kualitatif dan kuantitatif.	Terjadinya gap diantara <i>stakeholders</i> publik dan masyarakat lokal tidak diikuti dengan upaya untuk mengatasi gap tersebut.
11	I Made Suniastha Amerta (2017) “The Role of Tourism Stakeholders at Jasri	Mengetahui dan memahami peran <i>stakeholders</i> pariwisata dalam Wisata Jasri Desa yang dianggap berperan penting	Peran <i>stakeholders</i> pariwisata bisa dilihat di awal perencanaan Desa Wisata Jasri dan di pengembangannya.	Setiap peran <i>stakeholders</i> dijelaskan dengan dua fase yaitu pada masa perencanaan awal hingga masa	Tidak ada saran atau rekomendasi yang disampaikan

No	Peneliti, Judul, Tahun	Tujuan dan Metode Penelitian	Hasil	Kelebihan	Kekurangan
	Tourism Village Development, Karangasem Regency” <i>International journal of social sciences and humanities</i> , 1(2), 20-28.	mengembangkan pariwisata di desa. Metode yang digunakan kualitatif.	Berbagai upaya telah dilakukan pemangku kepentingan di Desa Jasri untuk memastikannya bahwa pengembangan Desa Wisata Jasri akan berhasil dan mampu memberikan dampak yang signifikan, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar Desa Pakraman Jasri di masa depan.	pengembangannya. Sehingga lebih jelas <i>stakeholders</i> yang mempunyai peran lebih, dari awal perintisan hingga pengembangannya.	oleh Peneliti.

Sumber: Diolah peneliti dari hasil *review* beberapa jurnal

1.5.2. Administrasi Publik

Administrasi mempunyai makna secara etimologis yaitu sebagai kegiatan yang berfokus dalam pengelolaan informasi, manusia, harta benda, hingga tercapainya tujuan yang terhimpun dalam organisasi. Pengertian administrasi dalam arti sempit adalah penyusunan serta pencatatan data dan informasi dengan tujuan untuk menjelaskan keterangan dan informasi secara sistematis untuk memudahkan dalam memperolehnya kembali. Sedangkan pengertian administrasi dalam arti luas dapat dikatakan sebagai upaya kerjasama yang dapat dilakukan dengan dua orang atau lebih dalam mencapai tujuannya.

To administer merupakan asal kata dari Administrasi yang dapat diartikan sebagai *to manage* atau kegiatan pengolahan. Sedangkan menurut Leo Agustino (2016), publik merupakan kata serapan yang berasal dari bahasa Inggris yaitu *public* yang mempunyai arti dua bentuk atau makna. Sebagai kata benda (*the public*) berarti *the community in general* atau *part of community having a particular interest in common*. Sebagai kata sifat (*public*) memiliki arti yang berkaitan dengan masyarakat atau orang banyak.

Administrasi publik memiliki poin penting yang berasal dari peran krusialnya dalam mengatur masyarakat. *Governance* atau tata kelola pemerintahan dapat berjalan secara baik dengan memeriksa sistem administrasi-politiknya. (Rabin, Hildreth, & Miller, 2006).

Administrasi Publik dimaknai sebagai organisasi dan manajemennya yang terdiri atas kumpulan individu serta beberapa perlengkapannya untuk mencapai tujuan pemerintah (Waldo dalam Pasolong, 2014:8). Pengertian ini berbeda

dengan apa yang disampaikan oleh Edward H. Litchfield, administrasi publik merupakan suatu studi mengenai macam-macam badan pemerintahan yang diorganisasikan, dilengkapi dengan tenaga-tenaganya, dibiayai, serta digerakkan dan dipimpin. (Inu Kencana, 2010:25).

Administrasi publik menjadi sebuah studi berisi kombinasi teori dan praktik dalam mempelajari sebuah penyelenggaraan pemerintahan dan/atau lembaga kenegaraan dalam rangka mencapai tujuan pemerintah yang diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan publik secara efektif dan efisien. Studi administrasi publik berusaha untuk menjelaskan bagaimana pemerintah memecahkan permasalahan publik melalui kebijakannya. Selain itu, bagaimana suatu kebijakan tersebut dapat terimplementasi secara efektif juga menjadi kajian dalam administrasi publik.

Ilmu administrasi mengalami beberapa perkembangan seperti halnya dengan ilmu pengetahuan lain. Administrasi publik mengalami paradigma dalam perjalanannya. Paradigma memiliki arti sebagai sebuah konsep yang telah digunakan para ilmuwan guna menguraikan fenomena perkembangan suatu ilmu pengetahuan dan/atau cara pandang dalam menganalisis fenomena sosial. Para ilmuwan telah membagi paradigma administrasi publik menjadi lima paradigma menurut Nicholas Henry (1988) dalam Pasolong (2013:28-30):

a. Paradigma dikotomi antara politik dan administrasi (1900-1926)

Paradigma ini memisahkan administrasi menjadi dua fokus yaitu administrasi publik dan politik. Fokus pertama menjelaskan bahwa ilmu administrasi negara terbatas hanya organisasi, kepegawaian, dan penyusunan anggaran dalam

birokrasi dan pemerintahan. Sedangkan mengenai permasalahan pemerintahan, politik, dan kebijaksanaan merupakan substansi dari ilmu politik (bukan administrasi publik).

b. Prinsip-prinsip Administrasi Negara (1927-1937)

Prinsip administrasi negara dapat diterapkan dimana saja walaupun berbeda kebudayaan, lingkungan, visi, misi dan lainnya. Sehingga dalam paradigma ini tidak mementingkan lokusnya, hanya saja fokus paradigma ini “prinsip-prinsip administrasi” dipandang dapat berlaku universal di semua organisasi dan setiap lingkungan sosial budaya.

c. Administrasi Negara sebagai ilmu politik (1950-1970)

Paradigma ini menjelaskan sebuah usaha untuk dapat menghubungkan kembali konseptual antara administrasi negara dan ilmu politik. Umar (2004) dalam Pasolong (2013) menyebutkan bahwa pada tahap ini administrasi negara sudah berkembang menjadi bagian dari ilmu politik. Selama masa ini terjadi, terdapat dua perkembangan baru yaitu: (a) Bertumbuhnya penggunaan studi kasus sebagai sesuatu sarana yang bersifat epistemologis, (b) Terdapat studi 14 perbandingan dan pembangunan administrasi sebagai salah satu bagian dari ilmu administrasi.

d. Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi (1954-1970)

Pada paradigma ini administrasi negara telah berkembang menjadi ilmu administrasi. Perkembangannya diawali dengan bantahan bahwa ilmu administrasi dianggap sebagai kelas dua setelah ilmu politik. Ilmu administrasi pada tahap ini sekedar memberikan fokus, tidak pada lokusnya.

e. Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi Negara (1970)

Paradigma ini menjelaskan bahwa administrasi negara telah berkembang menjadi ilmu administrasi negara, tidak hanya pada ilmu administrasi saja. Teori dalam ilmu administrasi negara merambah ke teori organisasi, ilmu kebijakan (*policy science*) serta ekonomi politik.

1.5.3. Kebijakan Publik

Studi mengenai kebijakan publik sangat diperlukan, hal ini dikarenakan dalam proses kehidupan manusia merupakan akibat dari adanya kebijakkan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Menurut Thomas R. Dye dan James Anderson (dalam Agustino, 2012:4-6) terdapat tiga alasan yang melatarbelakangi mengapa kebijakan publik perlu untuk dipelajari. Tiga alasan tersebut yaitu:

- (1) Pertimbangan atau alasan ilmiah (*scientific reasons*). Kebijakan publik dipelajari dalam rangka untuk menambah pengetahuan yang lebih mendalam. Mulai dari asalnya, prosesnya, perkembangannya, serta akibat-akibat yang ditimbulkan bagi masyarakat;
- (2) Pertimbangan atau alasan profesional (*professional reasons*). Don K. Price (dalam Agustino, 2012:5) memberikan pemisahan antara *scientific-estate* yang hanya berusaha menerapkan ilmu pengetahuan untuk memecahkan masalah sosial secara praktis. Dalam bahasa sederhana studi kebijakan digunakan sebagai dasar untuk menerapkan pengetahuan ilmiah dalam rangka memecahkan atau menyelesaikan masalah sehari-hari.

(3) Pertimbangan atau alasan politis (*political reasons*). Kebijakan publik dipelajari pada dasarnya agar setiap perundangan dan regulasi yang dihasilkan dapat tepat guna mencapai tujuan yang sesuai target.

Tiga pertimbangan tersebut (*scientific reasons, professional reasons, and political reasons*) menjadi pertimbangan yang melatarbelakangi para ilmuwan mempelajari kebijakan publik dalam memecahkan persoalan yang ada di dalam masyarakat, sehingga kedepannya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Secara umum, istilah “kebijakan” atau “*policy*” digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Pengertian kebijakan seperti ini dapat kita gunakan dan relatif memadai untuk keperluan pembicaraan-pembicaraan biasa, namun menjadi kurang memadai untuk pembicaraan-pembicaraan yang relatif ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik. Oleh karenanya, diperlukan batasan atau konsep kebijakan publik yang lebih tepat (Winarno, 2007:16). Menurut pandangan Winarno (2007:16) pada dasarnya terdapat banyak batasan atau definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kebijakan publik (*public policy*) dalam literatur-literatur ilmu politik. Masing-masing definisi tersebut memberikan penekanan yang berbeda-beda. Perbedaan ini timbul dikarenakan masing-masing ahli mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Dye (dalam Agustino, 2012:7) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah apa yang paling dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan. Carl Friedrich dalam Agustino (2012:7) berpendapat bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang

diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan serta kemungkinan dimana kebijakan tersebut disulkan agar berguna dalam mengatasi persoalan publik.

1.5.4. Analisis Stakeholders

Stakeholders atau pemangku kepentingan merupakan suatu sistem yang berdasar pada pandangan tentang organisasi dan lingkungannya, yaitu tentang sifat saling mempengaruhi secara komprehensif dan dinamis. *Stakeholders* dan organisasi merupakan dua hal yang saling berpengaruh, hal ini dikarenakan adanya keterkaitan sosial antara keduanya, yakni yang berbentuk tanggung jawab serta akuntabilitas. Oleh karenanya, organisasi memiliki akuntabilitas terhadap *stakeholdersnya*.¹

Rhenald Kasali dalam bukunya *Manajemen Public Relation, stakeholders* merupakan setiap kelompok yang ada di dalam maupun di luar perusahaan yang memiliki fungsi dan perannya dalam menentukan keberhasilan suatu perusahaan. *Stakeholders* bisa berarti juga kelompok/organisasi yang berperan dalam pengelolaan suatu fenomena.²

Dalam penelitian Handayani (2017) menjelaskan bahwa *stakeholders* menurut Maryono (2005) dibagi menjadi tiga kelompok, yakni diantaranya:

a. *Stakeholders* Kunci

Stakeholders ini merupakan individu atau organisasi yang mempunyai kewenangan legal dalam mengambil keputusan. Dalam hal ini,

¹ Marzully Nur dan Denies Priantinah, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Corporate Social Responsibility" Jurnal Nominal, Vol I, No I, 2012, hlm.24

² Kasali, Rhenald. 2003. Manajemen Public Relations: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Jakarta: PT. Pusaka Utama Grafiti.

stakeholders kunci ditujukan bagi mereka yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan suatu program.

b. *Stakeholders* Primer

Individu atau organisasi yang secara langsung terkena dampak positif maupun negatif atas rencana serta yang mempunyai keterkaitan kepentingan secara langsung dengan kegiatan tersebut. *Stakeholders* ini mempunyai kepentingan dan pengaruh penuh dalam tiap tahapan kegiatan.

c. *Stakeholders* Sekunder

Suatu organisasi atau individu yang tidak mempunyai kepentingan langsung atas rencana namun mempunyai tingkat kepedulian tinggi bagi proses pengembangan merupakan *stakeholders* sekunder. *Stakeholders* ini menjadi pendukung atau fasilitator dalam rangkaian proses pengembangan kegiatan, juga berpengaruh pada pengambilan keputusan. *Stakeholders* pendukung ini meliputi private sector, LSM, maupun akademisi.

Dalam menganalisis *stakeholders*, langkah pertama yang harus dilihat adalah menetapkan kepentingan dan pengaruh *stakeholders*. Penetapan *stakeholders* jika dilihat dari kepentingan dan pengaruhnya menurut Thompson (2011) dalam penelitian Handayani (2017) adalah sebagai berikut:

- a. Subyek (*subjects*). *Stakeholders* subyek ini memiliki tingkat kepentingan tinggi namun pengaruhnya rendah.
- b. Pemain kunci (*key players*). *Stakeholders* yang termasuk dalam *key players* adalah mereka yang mempunyai tingkat kepentingan dan pengaruh yang tinggi.

- c. Pengikut lain (*crowd*). *Stakeholders* ini mempunyai tingkat kepentingan dan pengaruh yang rendah.
- d. Pendukung (*contest setters*). Pendukung dalam hal ini merupakan mereka yang mempunyai tingkat kepentingan rendah namun tingkat pengaruh tinggi.

1.5.5. Peran Stakeholders

Peran seringkali dikaitkan dengan pemain, perilaku atau tindakan, dan tanggung jawab. Menurut Suhardono dalam Era (2019) teori peran berbicara mengenai kesatuan dari beberapa teori maupun orientasi ilmu dimana peran merupakan karakterisasi yang dibawa oleh aktor ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial. Dalam pengertian ini, konsep peran menurut Suhardono lebih ditekankan pada ‘posisi’, yang kemudian istilah posisi ini dikaitkan dengan status, *niche*, dan *office* (Suhardono dalam Era, 2019).

Peranan menurut Hanafie (2016: 166) diartikan sebagai tindakan seseorang untuk melaksanakan hak serta tanggung jawab yang disesuaikan dengan kedudukannya. Adapun dalam memahami peran dan peranan, ada teori peran (*Role Theory*) yang mengangkat paduan disiplin ilmu, teori, serta orientasi. Biddle dan Thomas dalam Sarwono (2015: 216-217) telah menjelaskan aspek dalam teori peran dengan menggolongkannya menjadi empat golongan, diantaranya yaitu:

- 1) Orang-orang yang telah mengambil bagian dalam interaksi sosial
- 2) Perilaku yang timbul atas interaksi tersebut
- 3) Kedudukan atau posisi orang-orang dalam perilaku
- 4) Kaitan antara orang dan perilaku.

Adapun menurut Nugroho (2014; 16-17), dalam program pembangunan terdapat *stakeholders* yang dapat diklasifikasikan berdasar pada perannya, yakni diantaranya:

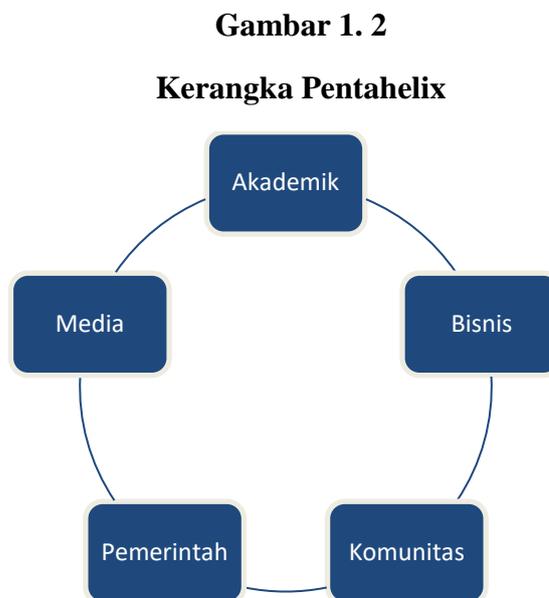
- 1) *Stakeholders as Policy Creator*, yakni *stakeholders* yang mempunyai peran sebagai penentu kebijakan dan pengambil keputusan.
- 2) Koordinator, yakni *stakeholders* yang mempunyai peran untuk mengkoordinasikan *stakeholders* lainnya yang ikut berperan atau terlibat dalam suatu program pembangunan.
- 3) Fasilitator, yakni *stakeholders* yang mempunyai peran untuk memfasilitasi kebutuhan kelompok sasaran.
- 4) Implementer, yakni *stakeholders* yang melaksanakan kebijakan yang mana terdiri atas kelompok sasaran.
- 5) Akselerator, yakni *stakeholders* yang mempunyai peran untuk percepatan dan kontribusi bagi program agar dapat berjalan sesuai dengan sasaran.

1.5.6. Pentahelix

Pariwisata merupakan suatu hal yang komprehensif, dimana selalu dituntut untuk adanya keberlanjutan. Dengan adanya tuntutan tersebut mengisyaratkan bahwa pariwisata harus selalu dikembangkan minimal dalam jangka waktu satu tahun. Pariwisata dikembangkan dengan menggunakan strategi kolaborasi menggunakan Model Pentahelix. Model Pentahelix ini diperkenalkan pertama kali oleh Arief Yahya selaku Menteri Pariwisata dan telah ditetapkan menjadi Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia nomor 14 tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Bentuk Kerjasama diantara

lima faktor yaitu akademik (*academic*), bisnis (*business*), komunitas (*community*), pemerintah (*government*), dan media atau disingkat ABCGM.

Bentuk kolaborasi dengan konsep Pentahelix ini menjadi kerjasama antara bidang akademik, bisnis, komunitas, pemerintah, dan media. Kelima bidang tersebut saling berkoordinasi dalam menyelesaikan permasalahan seperti halnya dengan pengembangan pariwisata yang membutuhkan kerjasama dari beberapa pihak. Kelima bidang tersebut memiliki keterkaitan dan akan membentuk suatu jaringan jika dilihat dari interaksi antar aktornya. Representasi sederhana mengenai Pentahelix adalah sebagai berikut:



Sumber: Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia nomor 14 tahun 2016.

a. Akademik (*academic*)

Akademik atau akademisi dalam hal ini mempunyai peran sebagai konseptor dimana dapat menginisiasi dengan menggunakan sumber pengetahuannya berupa konsep dan teori yang relevan.

b. Bisnis (*business*)

Bisnis dalam hal ini mempunyai peran sebagai *enabler*. Enabler disini biasanya berperan sebagai promotor yang menyediakan anggaran atau dana tambahan untuk menunjang perkembangan pariwisata.

c. Komunitas (*community*)

Komunitas dalam hal ini mempunyai peran sebagai akselerator. Komunitas dapat menjadi perantara antar *stakeholders* dalam rangka membantu proses perkembangan pariwisata. Pada umumnya, komunitas masyarakat yang terdiri atas warga setempat menjadi peran penting dalam perkembangan objek pariwisata tersebut.

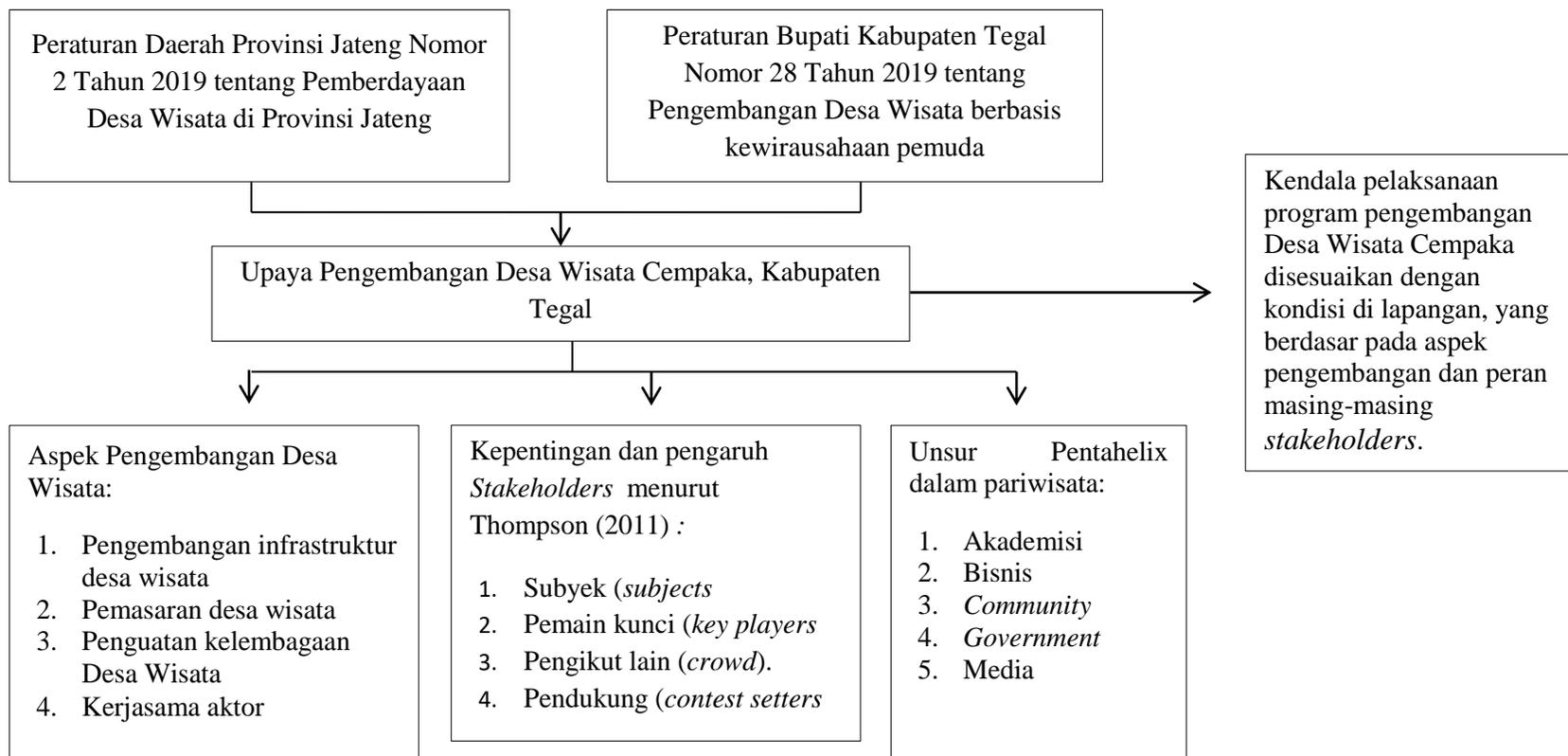
d. Pemerintah (*government*)

Pemerintah dalam hal ini mempunyai peran sebagai regulator dimana mempunyai kontrol dalam hal peraturan dan kebijakannya. Pemerintah mempunyai peran penting sebab dapat berperan di seluruh kegiatan, diantaranya perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, pengendalian, pemantauan, perizinan, dan lain sebagainya.

e. Media (*media*)

Media dalam hal ini mempunyai peran sebagai media publikasi dalam mempromosikan dan membranding sebuah objek pariwisata. Media juga berperan penting dan berpengaruh dalam pengembangan wisata, terlebih saat ini sudah memasuki masa dimana semua menggunakan teknologi dan media sosial.

1.5.7. Kerangka Berpikir



1.6.Operasional Konsep

Pada bagian ini peneliti memfokuskan pada fenomena yang akan diteliti, sehingga diperlukan suatu operasionalisasi konsep berupa rangkaian definisi konsep yang akan diteliti dalam “Analisis Peran *Stakeholders* dalam Pengembangan Desa Wisata dengan Menggunakan Kerangka Pentahelix”

Tabel 1. 5
Operasionalisasi Konsep

KONSEP	FENOMENA
<p>Analisis peran <i>stakeholders</i> dalam pengembangan Desa Wisata merupakan suatu pengamatan dan kajian mengenai tanggung jawab masing-masing <i>stakeholders</i> yang disesuaikan dengan aspek dalam pengembangan suatu Desa Wisata, yakni meliputi pengembangan infrastruktur Desa Wisata, pemasaran Desa Wisata, penguatan kelembagaan Desa Wisata, dan kerjasama aktor. Beberapa faktor yang mungkin menjadi penghambat peran <i>stakeholders</i> dalam Pengembangan Desa Wisata Cempaka diantaranya terbatasnya anggaran, sumber daya manusia terbatas, regulasi yang kurang mengatur, koordinasi dan kolaborasi.</p>	<p>Analisis peran <i>stakeholders</i> dalam upaya pengembangan Desa Wisata Cempaka dapat dikaji dengan dikaitkan aspek-aspek dalam pengembangan desa wisata, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pengembangan Infrastruktur Desa Wisata berkaitan dengan pembangunan fisik dalam hal sarana prasarana, industri kreatif dan rumah tangga, dan transportasi.2. Pemasaran Desa Wisata yang dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu, dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh <i>stakeholders</i> secara bertanggung jawab dalam membangun citra Desa Wisata.3. Penguatan kelembagaan Desa Wisata meliputi pengembangan kapasitas organisasi pengelola, mekanisme operasional dan sistem kepariwisataannya, serta peningkatan kapasitas SDM Desa Wisata.4. Kerjasama aktor dapat dilaksanakan oleh pengelola Desa Wisata dengan pihak lain (Akademisi, Bisnis, Pemerintah, dan

KONSEP	FENOMENA
	<p>Media) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar yang didasarkan atas hak dan kewajiban tiap <i>stakeholders</i>.</p> <p>Faktor yang dapat menghambat peran serta <i>stakeholders</i> dalam pengembangan Desa Wisata Cempaka dapat dilihat dengan beberapa hal, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Terbatasnya anggaran menjadi hambatan yang cukup vital dalam pengembangan Desa Wisata, dikarenakan anggaran merupakan penggerak dan faktor utama atas terselenggaranya kegiatan atau program. b. Sumber daya manusia yang terbatas dalam jumlah dan kualitasnya dapat menghambat jalannya suatu pengembangan Desa Wisata. c. Regulasi yang kurang jelas mengatur mengenai pengembangan Desa Wisata dapat menjadi penghambat. d. Koordinasi dan kolaborasi yang tidak berjalan secara efektif dapat menimbulkan hambatan baik dalam tahap perintisan maupun pengembangan Desa Wisata.

Sumber: Diolah peneliti, 2021

1.7. Argumen Penelitian

Pariwisata menjadi salah satu faktor yang sangat menunjang bagi penerimaan devisa negara, sehingga pemerintah pusat menginstruksikan kepada pemerintah daerah agar terus berupaya dalam membangun pariwisata daerahnya.

Salah satu yang menjadi perhatian pemerintah adalah pembangunan dan pengembangan desa wisata, yang mana program ini telah dicanangkan sejak 2009 dan kembali menjadi target Pemerintah kepada Daerah untuk kembali dikembangkan. Dalam berjalannya pengembangan desa wisata tentu membutuhkan peran serta beberapa pihak atau *stakeholders* yang saling berkolaborasi. Pada kenyataannya, tidak semua pihak turut serta dalam pengembangan desa wisata. Adapun pengembangan pariwisata disarankan melibatkan beberapa pihak yang tergabung dalam kerangka Pentahelix, yaitu diantaranya akademisi, pemerintah, bisnis, komunitas, dan media. Apabila terjadi hambatan dalam interaksi antar *stakeholders*, maka hal ini dapat menimbulkan terkendalanya program pengembangan desa wisata. Hambatan dapat terjadi dikarenakan beberapa *stakeholders* tidak memahami betul akan peran dan tanggung jawabnya, juga dipengaruhi oleh beberapa faktor lain seperti kurangnya anggaran, kurangnya SDM berkualitas, dan kurangnya koordinasi dan kolaborasi antar *stakeholders*.

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Tipe Penelitian

Pendekatan kualitatif memiliki dua tipe penelitian yaitu eksploratif dan deskriptif. Tipe penelitian eksploratif yaitu penelitian yang berusaha untuk menggali secara lebih mendalam terhadap suatu permasalahan. Penelitian eksploratif (*explorative research*) merupakan tipe penelitian yang memiliki tujuan untuk menggali suatu pengetahuan baru yang belum ada sebelumnya dan dapat menjawab atas suatu permasalahan. Sedangkan penelitian deskriptif yaitu

penelitian yang memiliki tujuan untuk mendeskripsikan gejala sosial tertentu. Penelitian deskriptif berusaha mengumpulkan data sebanyak-banyaknya untuk menjelaskan atau memberi gambaran atas suatu fenomena atau subyek penelitian.

Menurut Moleong (2010: 10-13) menjelaskan bahwa ada sekitar sebelas karakteristik dalam pendekatan kualitatif yaitu diantaranya; menggunakan latar belakang alamiah, menggunakan manusia sebagai instrument utama, menggunakan metode kualitatif (pengamatan, wawancara, atau studi dokumen) untuk menjangkau data, menjelaskan data secara induktif, menyusun teori dari bawah ke atas (misalnya *grounded theory*), menganalisis data secara deskriptif, lebih mementingkan proses daripada hasil, membatasi masalah penelitian berdasarkan fokus, menggunakan kriteria tersendiri (seperti triangulasi, pengecekan sejawat, uraian rinci, dan sebagainya) untuk memvalidasi data, menggunakan desain sementara (dapat disesuaikan dengan kenyataan di lapangan), serta hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama oleh manusia yang telah dijadikan sebagai sumber data.

Pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif dipilih karena permasalahan yang diteliti cukup kompleks dan dinamis serta urutan kegiatan yang dapat berubah kapanpun tergantung pada keadaan dan banyaknya gejala-gejala yang ditemukan. Oleh karenanya data yang telah ditemukan dari beberapa narasumber tersebut harus diseleksi dengan metode yang lebih alamiah seperti melalui wawancara. Selain itu, pendekatan kualitatif juga berusaha untuk membuat data deskriptif berupa ucapan atau tulisan yang dapat diamati dari subjek dan objek penelitian. Penelitian kualitatif sebagai penelitian yang dimaksudkan untuk

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lainnya secara holistic dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Berdasarkan jenis penelitian yang telah dikemukakan diatas maka peneliti memilih menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, dengan menggali fakta yang ada sebanyak-banyaknya dan menjelaskannya dengan pemahaman yang tepat dan jelas. Metode analisis kualitatif deskriptif dalam penelitian ini dilakukan melalui caranya yaitu mengumpulkan dan menganalisa data yang diperoleh dengan mengolahnya menjadi informasi yang dibutuhkan untuk menjawab tujuan penelitian. Dengan demikian, data yang diperoleh dapat berupa kata-kata, gambar, bukan angka-angka. Sehingga dalam penelitian ini akan mencoba mendeskripsikan atau menganalisis mengenai peran *stakeholders* yang terbentuk dalam pengembangan Desa Wisata Cempaka Kabupaten Tegal dengan menggunakan kerangka Pentahelix.

1.8.2. Situs Penelitian

Situs dalam penelitian ini adalah lokasi atau lokus penelitian dimana penelitian ini mengambil lokus di Desa Cempaka, Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal. Sedangkan fokus penelitian ini adalah mengenai peran aktor atau *stakeholders* dengan kerangka konsep Pentahelix dalam pengembangan Desa Wisata Cempaka Kabupaten Tegal. Peneliti masih menemukan adanya permasalahan atau gap yang terjadi di lapangan dimana belum ada pengembangan yang terlaksana di Desa Cempaka karena dalam pengelolaannya masih terpusat

oleh Pokdarwis. Disisi lain, pokdarwis tidak mampu jika melakukan pengembangan desa wisata ini tanpa adanya peran dari aktor lain. Oleh karenanya, peneliti tertarik untuk menganalisis bagaimana peran setiap aktor atau *stakeholders* dalam masa perintisan hingga pengembangan Desa Wisata Cempaka. Kemudian, peneliti juga tertarik untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam interaksi antar *stakeholders*.

1.8.3. Subjek Penelitian

Subjek atau informan merupakan orang atau individu yang dapat menjelaskan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Subyek penelitian inilah yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk sumber informasi mengenai situasi dan kondisi di lokasi penelitian. Teknik pemilihan informan yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini adalah *purposive*, dimana teknik ini merupakan teknik pemilihan informan dengan menggunakan pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam pengambilan informan.

Teknik *Purposive* adalah teknik pemilihan informan yang dipilih secara khusus oleh peneliti yang diselaraskan dengan tujuan penelitian. Teknik pemilihan informan tersebut bertujuan untuk memperoleh kunci informan yaitu *stakeholders* atau aktor dalam pengembangan Desa Wisata Cempaka. Subjek yang menjadi narasumber atau informan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Akademisi terdiri dari Perguruan Tinggi yang telah melakukan studi penelitian, pemberdayaan, dan pengembangan di Desa Wisata Cempaka, yakni salah satunya Universitas Pancasakti Tegal (UPS)

- 2) *Private sector* atau bisnis terdiri dari pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) kancah Kecamatan Bumijawa
- 3) *Community*, terdiri dari Pokdarwis Cempaka dan masyarakat Desa Cempaka (pedagang slumpring, pelaku UMKM desa, pemilik *homestay*, dan amuba)
- 4) *Government*, terdiri dari Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata, Pemerintah Desa Cempaka, Dinas Perhubungan, dan Dinas Perindustrian Tenaga Kerja Kab Tegal
- 5) Media terdiri atas media cetak dan digital, baik lokal maupun nasional, seperti NET TV dan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BP2D).

1.8.4. Jenis Data

Pada penelitian kualitatif di Desa Wisata Cempaka ini, peneliti menggunakan beberapa jenis data diantaranya yaitu:

- a. Data tertulis, data ini merupakan data yang berbentuk uraian atau penjelasan tertulis seperti Undang-Undang, Peraturan, dan sebagainya.
- b. Data Gambar, data ini merupakan data yang berbentuk gambar, simbol, diagram, peta, dan sebagainya.
- c. Data Tabel, data ini merupakan data yang disajikan dalam bentuk tabel.

Penelitian ini menggunakan kombinasi dari ketiga jenis data diatas agar memperoleh data yang relevan dan memudahkan peneliti dalam proses penelitian.

1.8.5. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah:

1. Data Primer

Data primer merupakan suatu data yang didapatkan dan dikumpulkan secara langsung dari sumbernya. Dalam penelitian, data primer ini diperoleh dengan cara melakukan *interview* secara langsung dengan narasumber.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan suatu data yang didapatkan dari studi pustaka atau bahan informasi lain seperti dokumen yang berhubungan dengan peran aktor dan jejaring aktor dalam pengembangan Desa Wisata. Oleh karenanya, peneliti tidak secara langsung mendapatkan data dari sumbernya, melainkan peneliti bertindak sebagai pemakai data yang berupa studi literatur terhadap buku-buku dan atau artikel ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian. Data sekunder pada penelitian ini berasal dari laporan penelitian terdahulu, profil dan dokumen-dokumen dalam pemerintahan Kabupaten Tegal, jurnal, internet, pedoman penelitian, peraturan perundang-undangan, dan sumber-sumber lain yang dapat menunjang laporan penelitian.

1.8.6. Teknik Pengumpulan Data

Data dapat diartikan sebagai salah satu komponen penelitian atau riset, yang mana tanpa data tidak akan ada penelitian. Data yang akan digunakan dalam penelitian haruslah benar, karena data yang salah akan memperoleh informasi yang salah pula. Data menurut Ridwan dalam Yanuar Ikbar (2012:155) adalah bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan informasi atau keterangan, baik kualitatif maupun kuantitatif yang menunjukkan fakta.

Pengumpulan data merupakan langkah yang harus dilakukan dalam penelitian untuk memperoleh data tentang topik penelitian. Menurut Sugiyono

(2004:156) pengumpulan data dapat dilaksanakan melalui berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara/ teknik. Jika dilihat dari *setting*-nya, data dikumpulkan pada setting alamiah yakni pada laboratorium dengan metode eksperimen, di tempat umum dengan berbagai macam responden, seminar, diskusi dan lainnya. Jika dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Selanjutnya, jika dilihat dari cara atau teknik, pengumpulan data dapat dilakukan dengan *interview* (wawancara), kuesioner (angket), observasi (pengamatan), dan gabungan ketiganya.

Pada dasarnya dalam penelitian terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang dapat digunakan, namun yang dapat digunakan hanya beberapa saja dalam usaha untuk pengumpulan data yang relevan. Oleh karenanya, cara yang sering digunakan adalah wawancara, dokumentasi, dan observasi, studi pustaka.

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data melalui :

- 1) Wawancara, dilakukan secara *facep to face* terhadap narasumber, dimaksudkan untuk mencari fakta-fakta atau informasi secara mendalam yang belum terungkap sehingga suatu fenomena sosial dapat dipahami. Wawancara ini dilakukan dengan tujuan memperoleh informasi dengan cara tanya jawab langsung kepada pihak-pihak yang sengaja dipilih dengan maksud agar dapat memberikan informasi yang diperlukan dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.
- 2) Dokumentasi, dilakukan dengan cara mengumpulkan data setiap bahan tertulis. Pada dasarnya dokumen sebagai sumber data yang dapat digunakan

untuk menguji, menafsirkan atau bahkan meramalkan. Dokumen yang dimanfaatkan dapat berasal dari mana saja sepanjang berhubungan dengan fokus penelitian, berupa arsip-arsip dan laporan pada pemerintah terkait.

- 3) Observasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis melalui pengamatan terhadap kenyataan-kenyataan yang terlihat dan terdengar mengenai objek penelitian.

Pada penelitian ini, observasi yang digunakan adalah nonpartisipan dimana peneliti tidak terlibat langsung dengan aktivitas subjek atau orang-orang yang diamati dan hanya sebagai pengamat independen. Peneliti juga menggunakan bentuk Observasi Terstruktur dimana observasi yang akan dilakukan telah dirancang secara sistematis, tentang apa yang akan diamati, kapan dan dimana tempat pengamatan.

- 4) Studi Pustaka, teknik mengumpulkan data yang dilakukan melalui pencarian informasi dari literatur dan buku yang relevan dari penelitian.

1.8.7. Analisis dan Interpretasi Data

Interpretasi data merupakan usaha untuk memperoleh arti dan makna yang lebih luas dan mendalam terhadap hasil penelitian yang sedang dilakukan di lapangan. Pembahasan hasil penelitian ini dilakukan dengan cara meninjau hasil penelitian secara kritis dengan teori yang relevan dan informasi yang akurat dari lapangan.

1. Reduksi data. Reduksi data atau secara singkat adalah kegiatan berupa merangkum atau menyederhanakan penelitian dalam hal ini peneliti

memfokuskan pada hal pokok dan penting yang berkaitan dengan topik dan tujuan penelitian, sehingga data yang sudah dirangkum memberikan gambaran.

2. Penyajian Data. Setelah data dalam penelitian direduksi atau disederhanakan, maka kemudian data tersebut disajikan atau dideskripsikan dalam bentuk hubungan, bagan, atau uraian singkat tentang data yang sudah direduksi.
3. Penarikan Kesimpulan. Langkah berikutnya dalam analisis data penelitian kualitatif yakni penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dimaksudkan agar data yang telah diperoleh dapat diketahui bagaimana sebab, hubungan, tema yang ada dalam suatu penelitian. Kesimpulan tersebut dapat disajikan dalam bentuk gambaran mengenai objek, kondisi, dan fenomena yang diperoleh sumber data penelitian.

1.8.8. Kualitas Data

Salah satu teknik untuk menguji keabsahan data adalah menggunakan teknik triangulasi. Menurut Sugiyono (2012:274) menguraikan tiga jenis teknik triangulasi yang meliputi triangulasi sumber, triangulasi teknis dan triangulasi waktu.

- 1) Triangulasi sumber adalah menguji kredibilitas data melalui cara pengecekan data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
- 2) Triangulasi teknis yakni menguji keabsahan data dengan mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik berbeda. Misalnya mengecek data hasil wawancara dengan observasi atau dokumentasi.

- 3) Triangulasi waktu, yaitu menguji keabsahan data yang diperoleh dalam waktu yang berbeda. Contohnya menguji data yang diperoleh dari narasumber yang sama dalam waktu yang berbeda.

Berdasarkan uraian di atas, dalam penelitian ini pengujian keabsahan datanya dengan menggunakan teknik triangulasi sumber dan teknis, dimana penelitian ini mengecek data yang diperoleh dari satu narasumber dengan narasumber lainnya. Data hasil pengecekan itu selanjutnya diuraikan untuk dapat ditarik kesimpulan.